



Regrouping & Peningkatan Mutu Jadi Solusi Kekurangan Murid SD

REGROUPING SD MULAI DIKAJI DI DIY

Berkurangnya jumlah murid baru di sejumlah SD negeri memunculkan wacana *regrouping* atau penggabungan sekolah di DIY. Gunungkidul menjadi daerah yang mulai mengkaji kebijakan tersebut, sedangkan Sleman dan Kota Jogja masih mengupayakan peningkatan daya tarik sekolah tanpa *regrouping*.

Sleman	Gunungkidul
- Belum menerapkan <i>regrouping</i> - SD negeri penyelenggara SPMB: 374 sekolah - SD dengan pendaftar kurang dari 10 siswa: 78 sekolah - Terdiri atas: 50 sekolah memperoleh 6-10 siswa 28 sekolah memperoleh 0-5 siswa - SDN Kandangan 2 hanya mendapat 1 siswa dari kuota 28 kursi	- Kuota SPMB: 13.804 kursi - Murid baru diterima: 6.731 siswa - SD tanpa murid baru: 13 sekolah - SD negeri dikaji <i>regrouping</i>: 9 sekolah - Pertimbangan: jumlah siswa belum memenuhi 1 rombel (28 siswa)
Kulonprogo	Kota Jogja
- Belum mengkaji <i>regrouping</i> - SDN Brosot: - Kuota 56 siswa - Pendaftar hari pertama 41 siswa - SDN 1 Lendah: - Pendaftar hari pertama 3 siswa	- Kapasitas SD negeri: 3.600-3.700 kursi - Murid baru diterima: sekitar 2.700 siswa - Kursi belum terisi: sekitar 1.000 - Belum menerapkan <i>regrouping</i> - Fokus meningkatkan mutu layanan dan promosi sekolah negeri



JOGJA—Sejumlah daerah di DIY menempuh cara berbeda untuk mengatasi sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan murid pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Gunungkidul mengkaji *regrouping*, sedangkan Kota Jogja memilih memperkuat kualitas sekolah.

David Kurniawan, Stefani Yulindriani & Khairul Ma'arif
redaksi@harianjogja.com

Banyak sekolah belum mampu memenuhi kuota ideal satu rombongan belajar yang berisi 28 siswa.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, SD negeri juga diminta memperkuat komunikasi dengan orang tua.

Di Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pendidikan mulai mengkaji *regrouping* terhadap sembilan SD negeri yang tidak memperoleh murid baru pada pelaksanaan SPMB 2026.

Kajian tersebut dilakukan setelah hasil SPMB menunjukkan daya tampung SD mencapai 13.804 kursi, sedangkan jumlah siswa yang diterima hanya 6.731 anak.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Gunungkidul Asbani mengatakan banyak sekolah belum mampu memenuhi kuota ideal satu rombongan belajar (rombel) yang berisi 28 siswa. Bahkan, terdapat 13 SD yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada SPMB tahun ini.

"Dalam penerimaan tahun ini masih banyak sekolah yang belum bisa memenuhi satu rombongan belajar sebanyak 28 anak. Bahkan ada 13 SD yang tidak mendapat murid dalam SPMB," kata Asbani, Minggu (28/6).

Dari 13 sekolah tersebut, sembilan merupakan SD negeri dan empat lainnya SD swasta. Menurut Asbani, salah satu solusi yang tengah dipersiapkan ialah *regrouping* bagi sekolah yang kekurangan murid. Namun, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian mendalam dan persetujuan Bupati Gunungkidul.

Regrouping & Peningkatan...

"Ini masih kami kaji. Tujuan penggabungan sekolah agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati membenarkan terdapat sembilan SD negeri yang berpeluang digabung dengan sekolah lain karena jumlah peserta didiknya belum mampu memenuhi satu rombongan belajar. "Tidak bisa memenuhi kuota satu rombongan belajar. Makanya, dikaji untuk bisa digabung dengan sekolah lain," kata Nunuk.

Ia menjelaskan *regrouping* mengacu pada Permendikbud No.17/2017. Salah satu syaratnya ialah sekolah memiliki jumlah siswa kurang dari 30 orang. Selain jumlah siswa, pemerintah juga mempertimbangkan jarak antarsekolah agar akses belajar tetap mudah. Sebelum diterapkan, Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak.

Berbeda dengan Gunungkidul, Pemerintah Kota Jogja menegaskan belum akan menerapkan *regrouping* SD negeri meskipun masih terdapat banyak kursi kosong.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan kapasitas penerimaan siswa baru kelas I SD negeri mencapai sekitar 3.600 hingga 3.700 kursi setiap tahun. Namun, pada tahun ajaran 2026 jumlah murid yang diterima baru sekitar 2.700 anak sehingga masih terdapat sekitar 1.000 kursi yang belum terisi.

"Kursi yang tidak diminati masyarakat masih sekitar 1.000. Padahal di sisi lain ada orang tua yang menyekolahkan anaknya ke swasta, tetapi kemudian mengeluh kesulitan membayar biaya sekolah. Ini menjadi perhatian kami," katanya, Minggu.

Menurut Hasto, kondisi tersebut menunjukkan sekolah negeri masih perlu meningkatkan kualitas agar semakin dipercaya

masyarakat. Karena itu, seluruh kepala SD negeri diminta lebih aktif memperkenalkan keunggulan sekolah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Ia menilai pilihan orang tua tidak hanya dipengaruhi kualitas akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan penguatan nilai religius. Selain itu, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk mendukung kesejahteraan guru honoror.

"Saya ingin SD negeri juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pendidikan karakter dan religiusitas, sehingga tidak kalah dengan sekolah swasta," ujarnya.

Pemkot Jogja juga menjadikan peningkatan jumlah peserta didik sebagai salah satu indikator evaluasi kepala sekolah. Meskipun pengangkatan kepala sekolah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah tetap dapat melakukan evaluasi hingga pemberhentian apabila kepala sekolah dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja sekolah.

Menanggapi kemungkinan *regrouping*, Hasto menegaskan kebijakan tersebut belum menjadi pilihan. "Sementara ini belum ada *regrouping*. Saya ingin mencoba dulu dengan mendorong kepala sekolah agar lebih aktif meningkatkan jumlah siswa," katanya.

Sebagai contoh, Hasto menyebut salah satu SD negeri di kawasan Pakualaman yang sebelumnya hanya memperoleh sekitar lima siswa baru setiap tahun kini berhasil meningkatkan jumlah peserta didik baru menjadi 25 anak. "Itu salah satu contoh peningkatan. Nanti sekolah-sekolah lainnya juga akan kami evaluasi," ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, SD negeri juga diminta memperkuat komunikasi

dengan orang tua melalui berbagai saluran, termasuk grup *WhatsApp* yang aktif menyampaikan perkembangan peserta didik.

Perbedaan Minat

Di Kabupaten Kulonprogo, pelaksanaan hari pertama SPMB SD juga menunjukkan perbedaan minat masyarakat. Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri Brosot di Kapanewon Galur Jumadi mengatakan sekolahnya telah menerima 41 calon siswa pada hari pertama pendaftaran.

"Sejauh ini sudah sampai 41 siswa yang mendaftarkan diri ke SDN Brosot di hari pertama SPMB," ujar Jumadi, Senin (29/6). Sejak loket dibuka pukul 08.00 WIB, antrean orang tua sudah terlihat di sekolah tersebut. SDN Brosot menyediakan kuota 56 siswa yang dibagi ke dalam dua rombongan belajar melalui jalur domisili radius, domisili wilayah, afirmasi, dan mutasi.

Jalur afirmasi mensyaratkan calon siswa terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterbitkan Kementerian Sosial. Ia menjelaskan seleksi jalur domisili radius mengutamakan jarak terdekat, usia calon siswa, dan nomor pendaftaran. Jalur domisili wilayah mengutamakan usia tertua, kemudian jarak rumah, lalu nomor pendaftaran.

Sebaliknya, SD Negeri 1 Lendah di Kapanewon Lendah yang berjarak sekitar satu kilometer dari SDN Brosot hanya menerima tiga pendaftar pada hari pertama. Sementara itu, di Kabupaten Sleman, rekapitulasi SPMB *online* hingga Minggu (22/6) menunjukkan 78 dari 374 SD negeri hanya memperoleh kurang dari 10 siswa baru.

Sebanyak 50 sekolah mendapatkan enam hingga 10 siswa, sedangkan 28 sekolah lainnya hanya memperoleh nol hingga lima siswa atau sekitar 20,8% dari total SD negeri di Sleman. (Andreas Yuda Pramono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005